

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketahanan pangan merupakan salah satu dari pembangunan nasional yang menjamin tersedianya pangan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Suatu komunitas atau rumahtangga dikatakan aman pangan apabila tidak mengalami kelaparan dan tidak melakukan pembatasan pangan. Berdasarkan data Kementerian Pertanian (2020), indeks ketahanan pangan Indonesia sebesar terus mengalami perbaikan setiap tahunnya dari angka dalam berbagai aspek ketahanan dan tercatat terjadi perbaikan situasi ketahanan pangan di beberapa kota atau kabupaten di Indonesia pada tahun 2019. Namun, peningkatan ketahanan pangan di tingkat lokal tidak menjamin tercapainya ketahanan pangan di tingkat rumahtangga atau individu (Lestari dkk, 2022).

Terwujudnya ketahanan pangan nasional bermula dari kenyataan bahwa basis kegiatan sektor pertanian adalah penyediaan pangan bagi rumahtangga di wilayah terkecil, yaitu daerah pedesaan. Tujuan pembangunan pedesaan adalah untuk mencapai ketahanan pangan di wilayah tersebut dengan sarana dan prasarana yang terpadu mulai dari ketersediaan pangan hingga konsumsi pangan untuk menjamin ketahanan pangan rumah tangga yang memadai dan efektif. Selain itu, pembangunan kehidupan pedesaan juga sangat penting, terutama yang berkaitan dengan pangan penduduk, pembangunan, bahan baku industri, dan pencarian ekspor. Oleh karena itu, desa menjadi sasaran berbagai program pendukung terwujudnya ketahanan pangan. (Ilsan, 2018).

Menurut Undang-Undang Pangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, Pasal 1 ayat 4 disebutkan bahwa ketahanan pangan adalah suatu keadaan terpenuhinya pangan bagi negara dan perseorangan atau rumah tangga, yang dinyatakan dalam tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup pangan, baik kuantitas maupun kualitasnya aman dari segala bahan berbahaya, serbaguna, bergizi, adil dan terjangkau sesuai kepercayaan dan budaya masyarakat untuk mencapai kehidupan yang berkelanjutan, aktif dan produktif.

Akses pangan merupakan aspek kritis dalam perwujudan ketahanan pangan selain ketersediaan dan pemanfaatan pangan, didukung dengan tersedianya infrastruktur fisik diantaranya adalah akses jalan dan jembatan. ketersediaan lahan produktif, irigasi, gudang, lumbung pangan dan pasar. Terdapat tiga kelompok mengenai akses pangan yaitu akses fisik, akses ekonomi dan akses sosial, ada pun 2 kelompok mengenai akses terhadap bahan pangan. Akses langsung, yaitu kemampuan individu memproduksi bahan pangan sendiri dan akses ekonomi (tidak langsung), yaitu kemampuan individu dalam memperoleh bahan pangan dengan membeli yang diproduksi dari tempat lain (Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah, 2018).

Memerangi permasalahan kekurangan pangan dan malnutrisi memerlukan banyak perhatian tetapi juga memerlukan inventasi teknologi kapital yang memungkinkan bagi masyarakat miskin untuk menjadi lebih produktif dan melibatkan kebijakan banyak sektor. Permasalahan terkait ketahanan pangan tidak lagi hanya disebabkan oleh permasalahan ketersediaan dan akses pasar, namun juga rendahnya kesadaran masyarakat akan konsumsi pangan sehat. Dengan

demikian permasalahan penyediaan pangan dapat melalui pendekatan program swasembada pangan, namun secara empiris masih menimbulkan permasalahan yaitu sulitnya menjaga konsistensi terhadap kebijakan swasembada yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu, program swasembada pangan dapat mengakibatkan terganggunya prinsip keunggulan komparatif dan kompetitif barang sampai pada tahap tertentu. Oleh karena itu, program swasembada pangan dengan substitusi impor masih memerlukan biaya yang tinggi sehingga sulit diterapkan di negara berkembang seperti Indonesia (Ilsan, 2018).

Permasalahan yang berkaitan dengan distribusi pangan bersumber dari ketersediaan dan distribusi pangan yang ada belum merata antar daerah, dan rumah tangga yang hingga saat ini masih terpusat pada ibu kota provinsi, kota kabupaten dan belum terjangkau ke daerah pedesaan. Selain itu faktor geografis seperti banyaknya kepulauan dan dengan akses sulit terjangkau, letak pasar yang sangat jauh, ketersediaan infrastruktur yang masih sangat kurang (baik infrastruktur sosial ekonomi maupun fisik terutama transportasi), akan menyebabkan lambatnya arus barang untuk konsumsi maupun produksi.

Permasalahan kerawanan pangan antara lain disebabkan oleh tidak adanya akses penduduk terhadap sumber-sumber produksi pangan seperti tanah, air, input pertanian, modal dan teknologi. Kondisi ketahanan pangan masyarakat pesisir biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor, khususnya rendahnya daya beli masyarakat untuk membeli pangan, ketersediaan produksi pangan lokal dan rendahnya ketahanan pangan penduduk. Selain itu, semua pihak tidak memperhatikan kelestarian sumber pangan lokal (jagung, umbi-umbian: singkong,

pisang dan talas) yang semakin menghilang seiring dengan menurunnya produksi pangan lokal. Hal ini karena para petani beralih ke tanaman pokok seperti jagung hibrida. Faktanya, tanaman pangan yang diperoleh dari benih yang lebih baik (jagung hibrida) tidak dapat menjadi sumber pangan masyarakat karena rasanya dan karena jagung hibrida ditujukan untuk nutrisi hewani. Selain itu, tidak adanya infrastruktur yang mendukung produksi pangan lokal (Warsilah, 2011).

Indeks ketahanan pangan Sulawesi Selatan memberikan kontribusi yang cukup besar untuk ketahanan pangan di Indonesia. Kondisi ketahanan pangan provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel produksi pangan dibawah ini:

Tabel 1. Pertumbuhan Produksi Pangan Provinsi Sulawesi Selatan, 2023

Komoditi		Persentase (%)
1.	Ubi kayu	7,86
2.	Kacang tanah	9,80
3.	Kacang hijau	14,88
4.	Buah-buahan	0,99
5.	Padi	9,03
6.	Jagung	10,03
7.	Ubi jalar	7,94
8.	Kedelai	47,62
9.	Sayur-sayuran	16,08

Sumber: Badan pusat statistik provinsi Sulawesi Selatan, 2024.

Berdasarkan Tabel 1, menunjukkan bahwa pertumbuhan pangan tertinggi adalah kedelai sebesar 47,62% disusul sayur-sayuran sebesar 16,08% dan yang terendah pertumbuhannya adalah buah-buahan sebesar 0,99%. Diliat dari jumlah persentase pertumbuhan produksi pangan yang ada di Sulawesi Selatan dapat disimpulkan bahwa produksi tertinggi adalah komoditi kedelai dan terendah pertumbuhannya adalah buah-buahan.

Sulawesi Selatan merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang termasuk wilayah lumbung pangan, terutama pangan strategis, seperti padi jagung dan umbi-umbian, namun demikian topografi dari wilayah Sulawesi Selatan yang tersebar pada beragamnya tipe agroekosistem yaitu pesisir, persawahan dan pegunungan. Untuk tipe agroekosistem pesisir dan pegunungan memiliki wilayah yang masih tergolong wilayah Rawan pangan akibat dari ketersediaan pangan yang masih kurang (Ilsan, 2018).

Sulawesi Selatan dengan beragam tipe seperti agroekosistem pesisir selain dari akses pangan kegiatan kearifan lokal juga akan menunjukkan bagaimana rumahtangga dalam mempertahankan dan mengolah pangan rumahtangga aspek ini sangat terkait dengan rancangan undang-undang tahun 2012 tentang pangan yang juga mengkaji tentang keyakinan dan kebudayaan masyarakat.

Menurut data pusat statistik kabupaten takalar pada tahun 2023, kabupaten takalar memiliki jumlah rumahtangga usaha pertanian yang berbeda-beda setiap kecamatan. Jumlah rumahtangga usaha pertanian adalah banyaknya rumahtangga yang melakukan minimal satu jenis kegiatan pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual atau ditukar (khusus tanaman pangan termasuk yang seluruhnya dikonsumsi sendiri). Di kabupaten takalar terdapat 9 kecamatan yang dimana terdapat rumahtangga usaha pertanian, banyaknya rumahtangga petani dan tanaman pangan. Potensi sektor pertanian yang dimiliki Kabupaten Takalar, termasuk di dalamnya merupakan potensi sektor pertanian di tingkat wilayah dengan ruang lingkup di bawahnya, dalam hal ini adalah wilayah kecamatan.

Tabel 2. Jumlah Rumahtangga Usaha Pertanian menurut Kecamatan di Kabupaten Takalar, 2023

No	Kecamatan	Rumahtangga Usaha Pertanian (KK)	Banyaknya Rumahtangga Petani (KK)	Tanaman Pangan (KK)
1.	Mangarabombang	6.706	5.890	5.034
2.	Mappakasunggu	912	663	285
3.	Sanrobone	2.131	1887	1.352
4.	Kepulauan Tanakeke	1.690	579	557
4.	Polongbangkeng Selatan	5.270	5.261	5.166
5.	Pattalassang	3.447	3.410	2.492
6.	Polongbangkeng Utara	8.366	8.339	7.748
7.	Galesong Selatan	3.143	2.552	2.406
8.	Galesong	4.413	3.609	3.060
9.	Galesong Utara	4.201	2.550	1.860
	Takalar	40.279	34.740	29.960

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar, 2024

Berdasarkan Tabel 2, menunjukan bahwa usaha pertanian di Kabupaten Takalar sebanyak 40.279 rumahtangga, banyaknya rumahtangga petani sebanyak 34.740 rumahtangga dan tanaman pangan sebesar 29.960 rumahtangga. Diliat dari jumlah rumahtangga usaha pertanian menurut kecamatan dikabupaten takalar terdapat rumahtangga usaha pertanian yang sedikit di kecamatan Mappakasunggu dan tertinggi di kecamatan polengbangkeng utara.

Kabupaten Takalar merupakan wilayah yang terdiri dari pantai, daratan dan perbukitan. Struktur prekonomian di Kabupaten Takalar masih di domonasi oleh sektor pertanian hal tersebut sesuai dengan besarnya kontribusi sector pertanian terhadap PDRB kabupaten yaitu sebesar 48,53 persen. Besarnya kontribusi sektor perikanan dan sub sektor tanaman pangan yaitu masing-masing sebesar 27,48 dan 15,72 persen. Hal ini menggambarkan ketersediaan pangan di Kabupaten Takalar relative cukup besar (Samsir, 2015). Berdasarkan data perhitungan PDRB pada tiga tahun terakhir, struktur perekonomian kabupaten takalar yang msih

didominasi oleh sektor pertanian sehingga ketahanan pangan dan akses pangan wilayah tersebut dalam kondisi baik.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka akan dilakukan penelitian tentang “**Model Akses Pangan Rumahtangga Pada Tipe Agroekosistem Pesisir di Kabupaten Takalar (Studi Kasus Desa Pa’lalakkang Kecamatan Galesong).**”

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan kaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tingkat akses pangan rumahtangga petani pada tipe agroekosistem pesisir di Desa Pa’lalakkang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar?
2. Bagaimana model akses pangan rumahtangga petani pada tipe agroekosistem pesisir di Desa Pa’lalakkang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi akses pangan rumahtangga pada tipe agroekosistem pesisir di Desa Pa’lalakkang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis tingkat akses pangan rumahtangga petani pada tipe agroekosistem pesisir di Desa Pa'lalakkang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar.
2. Menganalisis model akses pangan rumahtangga petani pada tipe agroekosistem pesisir di Desa Pa'lalakkang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar.
3. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi akses pangan rumahtangga pada tipe agroekosistem pesisir di Desa Pa'lalakkang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan dalam kegiatan penelitian dan sebagai syarat penyelesaian studi pada Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Muslim Indonesia.
2. Bagi pemerintah Kabupaten Takalar, penelitian ini sebagai acuan dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan khususnya pada model akses pangan rumahtangga petani pada tipe agroekosistem pesisir.
3. Bagi responden, penelitian ini digunakan sebagai bahan masukan untuk meningkatkan pengetahuan dalam menciptakan model akses pangan rumahtangga petani pada tipe agroekosistem pesisir.